



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BENI ISMAIL**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **265915**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.847.700.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m²/308 m² di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m²/36 m² di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000
3. Tanah Seluas 2.637 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 263.700.000
4. Tanah Seluas 608 m² di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
5. Tanah Seluas 96 m² di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/45 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
7. Tanah Seluas 780 m² di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 78.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 87.350.000

1. LAINNYA, --- (SEPEDA) ---- (SEPEDA) Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.900.000
3. MOBIL, SUZUKI KATANA 2 WD Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 14.150.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.878.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.965.078.000
III. HUTANG	Rp.	1.481.103.063
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	483.974.937

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.